

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Hingga saat ini masalah tumpang tindih kewenangan penegakan hukum oleh lembaga yang memiliki tugas patroli khususnya Hankam di zona maritim Indonesia masih berusaha mencari penyelesaian terbaik. Setidaknya ada 24 undang-undang yang mengatur mengenai penegakan dan keamanan di laut, dengan 6 lembaga yang memiliki kapal patroli dan 7 lembaga tidak memiliki kapal patroli di laut. Mengingat Indonesia merupakan *archipelagic state* yang hampir $\frac{3}{4}$ wilayahnya berupa lautan, Menyebabkan Indonesia perlu mengerahkan kekuatan dan keamanan maritim sebagai penegak hukum dan penegak kedaulatan yang harus dilaksanakan sesuai dengan instrumen hukum nasional dan hukum internasional Adapun zona maritim Indonesia menurut UNCLOS 1985 terdiri atas perairan pedalaman, perairan kepulauan, zona tambahan, ZEE, dan alur-alur laut, selat untuk pelayaran internasional landas kontinen Indonesia. Ini berarti penegakan hukum dan kedaulatan untuk keamanan maritim dilakukan di zona maritim di bawah kedaulatan penuh dan zona maritim di bawah wewenang dan hak-hak khusus.

Bakamla sebagai *Single Agency Multi Task* sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan, belum dapat mewujudkan koordinasi dan kerjasama yang baik antara kementerian/lembaga penegak hukum yang berwenang di zona maritim Indonesia. Hal ini disebabkan tidak adanya kesatuan komando operasi keamanan di wilayah perairan Indonesia dan wilayah yurisdiksi Indonesia; tidak jelas penanggung jawab terhadap terciptanya keamanan keamanan di wilayah perairan Indonesia & wilayah yurisdiksi Indonesia (karena semuanya punya kewenangan dan tanggungjawab tugas disini), terhambatnya kerjasama internasional di bidang kamlam karena tidak adanya institusi tunggal yang bertanggung jawab di bidang Keamanan laut. Baik tidaknya implementasi koordinasi ini tidak terlepas dari (1) jelas tidaknya pembagian kewenangan agar tidak tumpang tindih; (2) bentuk dan mekanisme koordinasi antar instansi; dan (3) penanggung jawab yang memiliki

otoritas memobilisasi kekuatan tersebut Banyaknya lembaga berwenang menyebabkan terganggunya penegakan hukum dan keamanan maritim. Karena itu kuncinya adalah koordinasi atau kerjasama. Perihal mengatur suatu organisasi dan cabang-cabangnya sehingga peraturan-peraturan dan tindakan-tindakan yang akan dilaksanakan tidak saling bertentangan atau simpang siur diperlukan suatu sistem atau aturan. Harus adanya sistem yang bisa menyatukan lembaga-lembaga penegak hukum di zona maritim Indonesia. Adanya pembagian wewenang yang jelas, sehingga kapal yang diperiksa pun tidak bingung.

Mengenai penyelesaian konflik yang mungkin terjadi berupa sengketa kewenangan atau permasalahan-permasalahan yang ditimbulkan dari tumpang tindih kewenangan antara Kementerian/Lembaga, dilakukan penyelesaiannya secara internal oleh Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan. Sebagaimana diatur dalam Pasal 3 huruf e Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2020 tentang Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan, bahwa penyelesaian isu di bidang politik, hukum, dan keamanan yang tidak dapat diselesaikan atau disepakati antar Kementerian/Lembaga dan memastikan terlaksananya keputusan dimaksud, namun hubungannya bersifat fungsional.

Selain itu upaya penyelesaian masalah kewenangan agar tidak terjadi tumpang tindih antar lembaga khususnya dalam aspek Hankam yaitu dengan 3 (tiga) cara, dimana ini merupakan pilihan yang dapat dipertimbangkan dengan keadaan saat ini. Ketiga cara tersebut yakni:

- a. *Joint Tasks Force*, ini merupakan penggabungan sebagai Satuan Tugas. Dimana nanti Kementerian/Lembaga bergabung menjadi satuan tugas dalam rangka penegakan hukum dan keamanan laut.
- b. Penguatan Bakamla. Penegakan hukum di zona maritim sebaiknya dilakukan oleh satu badan khusus yang mempunyai kewenangan yang jelas yaitu Bakamla.
- c. Penghapusan kewenangan yang sama:
 - Berupa penyusunan Perubahan Undang-Undang.
 - *Omnibus law*.

5.2 Saran

Perlu adanya kewenangan Bakamla dalam proses penyidikannya lebih lanjut guna tidak memperpanjang prosedur yang ada. Sehingga dalam implementasinya Bakamla sebagai perpanjangan tangan dari instansi pemangku kepentingan lainnya. Selain daripada kewenangan penyidikan, Bakamla belum memiliki payung hukum terkait kepemilikan alutsista (alat utama sistem persenjataan) sehingga saat ini alutsista yang dimiliki Bakamla dari Angkatan Laut.

Dilihat kewenangan Bakamla saat ini, bahwa Bakamla berperan sebagai pencegahan terhadap pelanggaran di laut. Perlu adanya aturan hukum yang mengatur mekanisme koordinasi dan komunikasi koordinasi sehingga kehadiran Bakamla sebagai pusat komando dan kendali dapat berjalan dengan baik terhadap pemangku kepentingan lainnya. Perlu adanya payung hukum yang mengikat secara keseluruhan mengenai koordinasi berbasis *one command*.

Pemerintah perlu untuk membuat strategi pemerintah dalam sebuah Dokumen Kemaritiman Nasional agar pelaksanaan kemaanan maritim maupun penegakan hukum di zona maritim Indonesia yang memiliki kompleksitas tinggi dapat dipantau terus oleh pemerintah.

DAFTAR PUSTAKA

A. Jurnal

- Eka Martiana 1Wulansari, *Penegakan Hukum Di Laut Dengan Sistem Single Agency Multy Tasks*. Jurnal RechtsVinding Online, diakses pada tanggal 31 Juli 2019.
- Ali Marwan HSB dan Evlyn Martha Julianthy, Pelaksanaan Kewenangan Atribusi Pemerintahan Daerah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, Jurnal Legislasi Indonesia Vol 15 No. 2, Juli 2018, hlm. 4.
- Ateng Syafrudin, “Menuju Penyelenggaraan Pemerintahan Negara yang Bersih dan Bertanggungjawab”, Jurnal Pro Justisia Edisi IV, Universitas Parahyangan, Bandung, 2000, hlm.22.
- Astri Agustiwi, Keberadaan Lembaga Negara Pasca Amandemen Undang-Undang Dasar di Indonesia, Journal Rechstaat Ilmu Hukum Fakultas Hukum UNSA, Surakarta, 2014.
- Andre Putra Rumegang, Kewenangan Tni Al Dalam Pemberantasan Tindak *Illegal Fishing* Menurut Perpres RI No. 115 Tahun 2015 Tentang Satuan Tugas Pemberantasan Penangkapan Ikan Secara Ilegal (*Illegal Fishing*), Jurnal *Lex et Societas*, Vol. IV/No.2/Feb/Edisi Khusus.
- Arie Afriansyah, Kewenangan Negara Pantai Dalam Mengelola Wilayah Laut, Jurnal Hukum dan Pembangunan Tahun ke-45 No.4 Oktober-Desember 2015, hlm. 614.
- Antonius Widyoutomo, “Pengamanan Laut Mewujudkan Keamanan Maritim”, dipaparkan pada 23rd *Asia Pacifik Naval College Seminar 2020* di Tokyo Jepang, hlm. 10.
- Ayi Melisa Cendiqia, Peran Direktorat Kepolisian Perairan dalam Penanggulangan Tindak Pidana Perampasan Terhadap Hasil Tangkapan Nelayan Rajungan Di Wilayah Perairan Lampung, Fakultas Hukum Universitas Lampung Bandar Lampung 2018, hlm. 19-20.

- Hendra Nurtjahjo, Lembaga, Badan, Dan Komisi Negara Independen (*State Auxiliary Agencies*) di Indonesia: Tinjauan Hukum Tata Negara, Jurnal Hukum dan Pembangunan, Tahun ke-35, No.3 Juli September 2005.
- Koesworo Setiawan, Kegagalan Komunikasi Politik “Stake Holder” Bakorkamla, Dosen FISIP Program Studi Ilmu Komunikasi dan Sains Universitas Djuanda Bogor, Media bahasa, dan Budaya Wahana, Vol 25, No 1, 2019 <https://journal.unpak.ac.id/index.php/wahana/article/view/1219>, hlm.67.
- Jurian Runtukahu, Tanggung Jawab Polisi Perairan Dalam Penegakan Hukum di Wilayah Laut Teritorial Republik Indonesia, Jurnal *Lex ET Societatis*, Vol. IV/No.1/Jan/2016
- Makmur Keliat, *Keamanan Maritim dan Implikasi Kebijakannya bagi Indonesia*, Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Volume 13, Nomor 1, Juli 2009.
- Shanti Dwi Kartika, Keamanan Maritim Dari Aspek Regulasi Dan Penegakan Hukum, Jurnal Ilmiah Hukum (Negara Hukum Membangun Hukum untuk Keadilan dan Kesejahteraan), Jakarta, 2014, hlm. 144.
- Suwardi M., Penegakan Hukum di Laut Dalam Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia, Jurnal Hukum dan Pembangunan Vol. 15 No. 1, 1985 <http://jhp.ui.ac.id/index.php/home/article/view/1100/1023Home> diakses tanggal 20 Mei 2020.
- Gentur Wasisto, Kewenangan Bakamla Dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Tertentu Dilaut Berdasarkan UU No.32 Tahun 2014 Tentang Kelautan, Jurnal Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Memperoleh Gelar Magister Ilmu Hukum (M.H.), Malang, 2019.
- Nina Firda Amalia, Analisis Kewenangan Badan Keamanan Laut Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 178 Tahun 2015 tentang badan Keamanan Laut, E-Journal Naskah Publikasi, 2018
- Penataan Pengamanan Maritim Wilayah Maritim guna Memelihara Stabilitas Keamanan dalam Rangka Menjaga Kedaulatan NKRI, Jurnal Kajian Lemhannas RI, Edisi 14, Desember 2012.

- Pelaksanaan Tugas dan Wewenangan Kementerian Kelautan dan Perikanan dalam Penerbitan Izin Usaha Perikanan di Bidang Perikanan Tangkap, *Dipenogoro Law Jurnal* Vol. 5 No. 3, 2016, hlm. 4.
- Alief Hadi Zulkarnaen, *Sistem Penegakan Hukum pada Zona Maritim: Suatu Perbandingan*, FH UI, 2016.
- Lutfi Brilliant Wanda, *Analisis Hukum dan Kelembagaan Penegakan Hukum di Bidang Perikanan, Program Studi Teknologi dan Manajemen Perikanan Tangkap Departemen Pemanfaatan Sumberdaya Perikanan Fakultas Perikanan Dan Ilmu Kelautan Institut Pertanian Bogor*, Agustus 2012
- Margaretha Quina, *Ulasan Undang-Undang Nomor 32 Tahun tentang Kelautan, “Penegakan Hukum di Laut”*: Peluang dan Tantangan. *Jurnal Hukum Lingkungan* Vo. 2 Issue1, Juli 2015
- Penataan Pengamanan Maritim Wilayah Maritim Guna Memelihara Stabilitas Keamanan Dalam Rangka Menjaga Kedaulatan Nkri, *Jurnal Kajian LEMHANNAS RI*, Edisi 14, Desember 2012.
- Sulistiyani Eka Lestari, *Penyelesaian Sengketa Kewenangan Antar Lembaga Oleh Mahkamah Konstitusi, DIH*, *Jurnal Ilmu Hukum* Vol. 10, No. 19, Februari 2014.
- Sudardi, *Peranan TNI Angkatan Laut dalam Penegakan Hukum di Wilayah Perbatasan Laut Indonesia*, *Jurnal Ilmu hukum Lex Librum* Vol. 1 No. 1 Desember 2014.
- Syaiful Anwar, *Posisi Keamanan Maritim Dalam Rangka Sistem Pertahanan Negara*, *Jurnal Pertahanan Indonesia*, Agustus 2013, Vol. 3 No. 2.
- Yerrico Kasworo, *Restrukturisasi Kewenangan Guna Mendukung Pengelolaan Ruang Laut Yang Berdaulat Dan Berkelanjutan*, *Jurnal Rechtsvinding Online*, *Media Pembinaan Hukum Nasional* Vol. 8 No. 2, Pusat Analisis Dan Evaluasi Hukum Nasional Badan Pembinaan Hukum Nasional, Jakarta, Agustus 2019.

B. Buku

- Badan Informasi Geospasial. 2018, *Geomaritime Indonesia Kajian Histori, Sumberdaya dan teknologi menuju Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia*, Badan Informasi Geospasial, Yogyakarta.
- Badan Pembinaan Hukum Nasional. 2006, *Laporan Penelitian Tentang Penegakan Hukum di Perairan Indonesia dan Zona Tambahan*, Jakarta.
- Boer Mauna, Hukum Internasional Edisi Kedua, PT. Alumni, Bandung.
- Conni Rahakundini Bakrie, Pertahanan Negara dan Postur TNI Ideal, Jakarta, Yayasan Obor Indonesia, 2007, cet. ke-1, hlm. 49.
- Sodik, Dikdik Mohamad. 2011, *Hukum Laut Internasional dan Pengaturannya di Indonesia*, PT. Refika Aditama, Bandung.
- Agus, Ety R. dalam Dikdik Mohamad Sodik, 2011, *Hukum Laut Internasional dan Pengaturannya di Indonesia*, PT. Refika Aditama, Bandung.
- Aminuddin Ilmar, Hukum Tata Pemerintahan, Kencana, Jakarta, 2014, hlm. 101.
- Ateng Syafrudin, Pengaturan Koordinasi Pemerintahan di Daerah, 1993, Bandung, Citra Aditya Bakti.
- ASP Baviera, J Batongbacal, *The West Philippine Sea: The Territorial and Maritime Jurisdiction Disputes from a Filipino Perspective Manila: The Asian Center and Institute for Maritime*, 2013.
- Anggota IKAPI, Undang-Undangn Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia, Fokus Media, Bandung, 2014, cet. ke-1, hlm. 51.
- Dikdik Mohamad Sodik, Hukum Laut Internasional dan Pengaturannya di Indonesia, PT. Refika Aditama, Bandung, 2011, hlm. 17.
- Erma Yulihastin, Bekerja Sebagai Polisi, Erlangga Grup, Jakarta, 2008.
- Ety R. Agus dalam Dikdik Mohamad Sodik, Hukum Laut Internasional dan Pengaturannya di Indonesia, Bandung: PT. Refika Aditama, 2011, hlm. 19.
- Handyaningrat, Manajemen Konflik, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1989,

- Handoko, Manajemen Personalia dan Sumber Daya Manusia, Yogyakarta, BPFPE, 2003.
- Hoogerwerf, A. Ilmu Pemerintahan, Jakarta, Penerbit Erlangga, 1978
- Husen, Harun M. 1990, *Kejahatan dan Penegakan Hukum Di Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Padmo Wahyono, Ilmu Negara, Indo Hil. Co, Jakarta, 2003
- I Wayan Parthiana, 2014, *Hukum Laut Internasional dan Hukum Laut Indonesia*, Yrama Widya, Bandung.
- Ibrahim, Johnny. 2013, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia Publishing, Malang.
- Indian Navy, *Ensuring Secure Seas: Indian Maritime Security Strategy*, (New Delhi: Integrated Headquarters - Indian Ministry of Defence, 2015).
- Indroharto, *Usaha Memahami Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara*, Jakarta: Sinar Harapan, 1993, hlm. 83.
- Inu Kencana Syafiie, Manajemen Pemerintahan, Pusaka Reka Cipta, Jakarta, 2011.
- I Made Arsana, *Batas Maritim Antarnegara: Sebuah Tinjauan Teknis dan Yuridis*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 2007, hlm. 30-31.
- F.P.C.L. Tonnaer, *Legal Besturen: Het Legaliteitsbeginsel. Toetssteen of Struikelblok*, dalam Ridwan, *Hukum Administrasi di Daerah*, (Yogyakarta: FH UII Press, 2009), hlm 66-67.
- Jerry Indrawan, *Studi Strategis dan Keamanan*, Jakarta, Nadi Pustaka, 2015, hlm. 69.
- Jimly Asshiddiqie, *Sengketa Kewenangan Antarlembaga Negara*, Cetakan Pertama, Konstitusi Press, Jakarta, 2005.
- Jimly Asshiddiqie, *Perkembangan & Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Amandemen*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta, 2007.
- Made Nurmawati, et.al. *Hukum Kelembagaan Negara*, Fakultas Hukum Universitas Udayana, Denpasar, 2017
- Marjanne Termorshuizen, *Kamus Hukum Belanda-Indonesia cet-2*, Djambatan, Jakarta.

- Muhammad Yasin, et.al. Anotasi Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintah, Universitas Indonesia – *Center for Study of Governance and Administrative Reform (UI-CSGAR)*, hlm. 72.
- M Rudy, Hukum Internasional II, Rafika Aditama, Bandung, 2006, hlm. 18.
- Natalie Klein, ed., 2011, *Maritime Security and The Law of See*, New York, *Oxford University Press*.
- Nicolai, P. & Olever, B.K., *Bestuursrecht*, Amsterdam, 1994, hlm. 4
- Nur Basuki Winanrno, *Penyalahgunaan Wewenang dan Tindak Pidana Korupsi*, laksana mediatama, Yogyakarta, 2008, hlm. 65.
- Retno Windari, *Hukum Laut, Zona-Zona Maritim Sesuai UNCLOS 1982 dan Konvensi-Konvensi Bidang Maritim*, Badan Koordinasi Keamanan laut, Jakarta, 2009, hlm. 24.
- Safri Nugraha, dkk, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2007, hlm. 31.
- Soerjono Soekanto, 1983, *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. UI Press, Jakarta.
- Suryo Sakti Hadiwijoyo, 2009, *Batas-batas Wilayah Negara Indonesia, Dimensi, Permasalahan, dan Strategi Penanganan (Sebuah Tinjauan Empiris dan Yuridis)*, Penerbit Gava Media, Yogyakarta.
- Inu Kencana Syafie, *Manajemen Pemerintahan*, Pusaka Reka Cipta, Jakarta, 2011.
- Jimly Asshiddiqie, *Perkembangan & Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Amandemen*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia, *Kajian Pengawasan Lalu Lintas Laut di Indonesia*, (Jakarta: Kementerian Keuangan Republik Indonesia, 2014).
- Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, 1998, Jakarta, Gramedia Pustaka Utama, hlm. 35-36
- Muhamad SV, *Batas Wilayah Negara Dalam Perspektif Hukum Internasional, dalam Batas Wilayah dan Situasi Perbatasan Indonesia: Ancaman Terhadap Integritas Teritorial*, Tiga Putra Utama, Jakarta, 2004.

- Nomensen Sinamo, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta: Jala Permata Aksara, 2010, hlm. 89.
- Syamsumar Dar, 2010, *Politik Kelautan*, Bumi Aksara, Jakarta.
- Erma Yulihastin, *Bekerja Sebagai Polisi*, Erlangga Grup, Jakarta, 2008.
- Andrisman, Tri. 2007, *Hukum Pidana Asas-Asas Dan Dasar Aturan Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Sakti, Bandar Lampung.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2001, *Penelitian Hukum Normatif*, Cetakan IV, RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- William T Burke. 1994, *The New International Law of Fisheries: UNCLOS 1982 and Beyond*, Clarendon Press: Oxford.
- Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia Publishing, Malang, 2013, hlm. 295.
- Prajudi Atmosudirdjo, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1981, hlm. 76.
- Taliziduhu Ndraha, *Kybernology (Ilmu Pemerintahan Baru) Jilid 2*, PT Rineka Cipta, Jakarta, 2003
- Ronny Hanitjo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Semarang, 1990, hlm. 97-98.
- Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Penerbit Balai Pustaka, Jakarta, 1989.
- Tri Patmasari, et al., *Perkembangan terakhir Batas Maritim Indonesia Dengan Negara Tetangga*, Pusat Pemetaan Batas Wilayah, Badan Informasi Geospasial, Seminar Nasional Peran Geospasial dalam Membingkai NKRI 2016, hlm. 6.
- Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, Rajawali Pers, Jakarta, 2006, hlm. 102.
- Rimdan, *Kekuasaan Kehakiman Pasca Amandemen Konstitusi*, Kencana Prenada media, Jakarta, 2012.
- Ronny Hanitjo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Semarang, 1990.

C. Undang-Undang

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Amandemennya.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1973 tentang Landasan Kontingen Indonesia, L.N.R.I. Tahun 1973 Nomor 1, T.L.N. No. 2994.

United Nation Convention on the Law of the Sea 1982 (UNCLOS 1982).

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia, L.N.R.I. Tahun 1983 Nomor 44, T.L.N. No. 3260.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985 Tentang Pengesahan United Nations Convention on the Law of the Sea 1982, L.N.R.I. Tahun 1985 Nomor 76, T.L.N. No. 3319.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, L.N.R.I. Tahun 1990 Nomor 49, T.L.N. No. 3419.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan, L.N.R.I. No. 75 Tahun 1995. T.L.N. No. 3612.

Undang-Undang 76 Tahun 1995 tentang Cukai, L.N.R.I. No. 76 tahun 1995. T.L.N. No. 3613.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia, L.N.R.I. Tahun 1996 Nomor 73, T.L.N. No. 3647.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara RI, L.N.R.I. Tahun 2002 Nomor 2, T.L.N. No. 4168.

Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia, L.N.R.I. Tahun 2004 Nomor 127, T.L.N. No. 4439.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Nasional Jangka Panjang Tahun 2005-2025.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran, L.N.R.I. Tahun 2008 Nomor 64, T.L.N. No. 4849.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, L.N.R.I. Tahun 2008 Nomor 59, T.L.N. No. 4844.

Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara

Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, L.N.R.I. Tahun 2009 Nomor 154, T.L.N. No. 5073.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau- Pulau Kecil, L.N.R.I. Tahun 2014 Nomor 2, T.L.N. No. 5490.

Peraturan Presiden Nomor 178 Tahun 2014 tentang Badan Keamanan Laut.

D. Artikel dan Informasi Lainnya dari Internet

Ardinanda Sinulingga, Peta Kewenangan Penegakan Hukum, <http://Maritimnews.Com/2016/05/Peta-Kewenangan-Penegakan-Hukum-Di-Laut-Indonesia/> diakses pada tanggal 3 Oktober 2019 pukul 23.03.

Drama Panca Putra, Pengawasan SDKP, Direktur Pengawasan Pengelolaan Sumber Daya Perikanan, Webinar Penguatan Kelembagaan Sistem Keamanan Laut Indonesia, *Indonesia Ocean Justice Initiative*, 30 Juni 2020.

Robert Mangindaan, *Indonesia dan Keamanan Maritim: Apa Arti Pentingnya?* <http://www.fkpmaritim.org/indonesia-dan-keamanan-maritim-apa-arti-pentingnya/>, diakses tanggal 31 Juli 2019 Pukul 18.12.

Heru Pambudi, Pengawasan Laut Direktur Jenderal Bea Cukai, Kementerian Keuangan RI, Webinar Penguatan Kelembagaan Sistem Keamanan Laut Indonesia, *Indonesia Ocean Justice Initiative*, 30 Juni 2020.

Kementerian Komunikasi dan Informatika RI, *Menuju Poros Maritim Dunia* https://www.kominfo.go.id/content/detail/8231/menuju-poros-maritim-dunia/0/kerja_nyata, diakses tanggal 31 Juli 2019.

Kepala Staf Angkatan Laut, Sistem Keamanan Laut Indonesia Perspektif TNI AL, Webinar Penguatan Sistem Keamanan Laut di Indonesia, *Indonesia Ocean Justice Initiative*, Juni 2020.

Lotaria Latif, Peran Polri Dalam Penguatan Kelembagaan Sistem Keamanan Laut Indonesia, Kakorpolairud Barhakam Polri, Webinar Penguatan Kelembagaan Sistem Keamanan Laut Indonesia, Indonesia *Ocean Justice Initiative*, 30 Juni 2020.

Luluk, Anggota Komisi IV DPR RI Fraksi Kebangkitan Bangsa, Webinar RUU Cipta Kerja dan Pembangunan Kelautan Berkelanjutan, *Indonesia Ocean Justice Initiative*, Jakarta, 22 Juni 2020

Rokhmin Dahuri, *Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia*, Media Indonesia, tanggal 9 September 2014.

Syahrowi R. Nusir, Kepala Sekretariat Dewan Kelautan Indonesia, *Komparasi Kebijakan Kelautan Indonesia dengan Negara-Negara Anggota ASEAN*, disampaikan di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, 13 November 2012, <https://rezaaidilf.files.wordpress.com/2012/11/bahan-paparan-kaset-dekin-di-fh-unsri-13-nov-2012.ppt>, diakses tanggal 31 Juli 2019.

Dhio Faiz, Djuanda Kartawidjaja, Sang Penjaga Kedaulatan, <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20180816173923-20-322870/djuanda-kartawidjaja-sang-penjaga-kedaulatan-maritim> diakses 11 September 2019.

<https://video.tribunnews.com/view/126108/bakamla-dan-12-institusi-teknou-pengawasan-pengamanan-dan-pemanfaatan-sdi-di-laut-natuna>, diakses pada tanggal 24 Juni 2020.

Penguatan Sistem Keamanan Laut di Indonesia & Peran Bakamla oleh Kabakamla (Laksamana Madya TNI Aan Kurnia, S.Sos. M.M.), *Indonesia Ocean Justice Initiative*, Jakarta, 5 Juni 2020.

Antonius Widyoutomo, “Pengamanan Laut Mewujudkan Keamanan Maritim”, dipaparkan pada 23rd *Asia Pacific Naval College Seminar 2020* di Tokyo Jepang.

<https://puslitbang-polri.e-journal.id/LitbangPOLRI/article/download/6/8/>, diakses pada tanggal 2 Juni 2020.

<http://setkab.go.id/pbb-verifikasi-16-056-nama-pulau-indonesia/>, diakses pada tanggal 10 September.

<https://katadata.co.id/berita/2020/01/07/pemerintah-akan-rombak-24-uu-melalui-omnibus-law-keamanan-laut>, diakses pada tanggal 20 Februari 2020.

<https://kbbi.kata.web.id/>, diakses tanggal 20 Februari 2020.

https://bakamla.go.id/home/artikel_lengkap/4255/01794797cc178d039e90cc3f4d286b9d, diakses 20 Mei 2020.

<https://eprints.uny.ac.id/22877/4/4%20BAB%20II.pdf>, diakses tanggal 3 Juni 2020.

<http://www.polair.or.id/index.php/home/57-ur-binfung/934-pedomanpelaksanaan-tugas-fungsi-polair-dalam-rangkamendukung-program-polmas>, diakses tanggal 11 Juni 2020.

<http://hubla.dephub.go.id/unit/kplp/Pages/Tugas-Fungsi.aspx>, diakses pada tanggal 13 Juni 2020.

<https://kkp.go.id/djpsdkp/page/164-profil>, diakses pada tanggal 16 Juni 2020.

<https://www.beacukai.go.id/arsip/abt/tugas-pokok-dan-fungsi.html>, diakses pada tanggal 16 Juni 2020.

https://www.setneg.go.id/baca/index/presiden_jokowi_lantik_aan_kurnia_sebagai_kepala_bakamla, diakses pada tanggal 17 Juli 2020.

Jimly Asshiddiqie, Penegakan Hukum, jimly.com/makalah/namafile/56/Penegakan_Hukum.pdf, diakses tanggal 20 April 2020.

M. Ambari, Pemerintah Keluarkan Data Resmi Wilayah Kelautan Indonesia, Apa Saja Yang Terbaru? <https://www.mongabay.co.id/2018/08/27/pemerintah-keluarkan-data-resmi-wilayah-kelautan-indonesia-apa-saja-yang-terbaru/>, diakses pada tanggal 2 Januari 2020.

Laksamana Madya TNI Ane Soedewo, S.E., M.H. (Kepala Badan Keamanan Laut RI), Kuliah Umum Hukum Laut Internasional “Penegakan Hukum Di Wilayah Laut Indonesia”, Research Cluster For Sustainable Ocean Policy (CSOP), 12 April 2018, Auditorium Djokosoetono FHUI, Kampus UI Depok. <https://law.ui.ac.id/v3/penegakan-hukum-di-wilayah-laut-indonesia/> diakses pada tanggal 19 Desember.

Rokhmin Dahuri, Indonesia Sebagai Poros Maritim Dunia, Media Indonesia, diakses tanggal 9 September 2019 pukul 15.22.

Indonesia Negara Maritim, Tapi Minim Wawasan Bahari, <http://www.tempo.co/Read/News/2014/05/31/090581338/P-Indonesianegeri-Maritim-Tapi-Minimwawasan-Bahari>, diakses pada tanggal 2 Oktober 2019 pukul 21.31.

Penguatan Sistem Keamanan Laut di Indonesia & Peran Bakamla oleh Kabakamla (Laksamana Madya TNI Aan Kurnia, S.Sos., M.M.), *Indonesia Ocean Justice Initiative*, Jakarta, 5 Juni 2020.

Syarif Hasan, Penguatan Kelembagaan Sistem Keamanan Laut Indonesia, Wakil Ketua MPR RI, Webinar Penguatan Kelembagaan Sistem Keamanan Laut Indonesia, *Indonesia Ocean Justice Initiative*, 30 Juni 2020.

Stephanie Juwana, *Director of International Engagement and Policy Reform*, Webinar RUU Cipta Kerja dan Pembangunan Kelautan Berkelanjutan, *Indonesia Ocean Justice Initiative*, Jakarta, 22 Juni 2020.

Umar Aris, Penguatan Kelembagaan Sistem Keamanan Laut Indonesia, Staff Ahli Kementerian Perhubungan Republik Indonesia, Webinar Penguatan Kelembagaan Sistem Keamanan Laut Indonesia, *Indonesia Ocean Justice Initiative*, 30 Juni 2020.

